

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu topik yang masih belum dapat diselesaikan oleh negara-negara di dunia hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk mengentaskan kemiskinan pada masing-masing negara, namun cara yang tidak tepat malah membuat kesenjangan yang semakin tinggi antara si kaya dan si miskin. Berbagai bentuk faktor yang mempengaruhi sulitnya upaya untuk mengentaskan kemiskinan, seperti : pendidikan, status sosial, lapangan pekerjaan, ataupun demografi di dunia.

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar juga masih kesulitan dalam menghadapi permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut (Worldometers, 2021), Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk sebanyak 273.523.615 jiwa pada tahun 2020. Indonesia berada di bawah China (1.439.323.776 jiwa), India (1.380.004.385 jiwa), dan Amerika Serikat (331.002.651 jiwa) sedangkan di urutan kelima ada Pakistan (220.892.340 jiwa). Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar. Menurut (worldpoverty.io, 2022), jumlah penduduk miskin di dunia adalah 716,69 juta jiwa pada tahun 2021 menurun sebanyak 25,2 juta jiwa dibandingkan tahun 2020, yakni sebanyak 741,89 juta jiwa. Sedangkan Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 27,54 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin sebanyak 10,14% pada periode Maret 2021 (Badan Pusat Statistik, 2019). Dengan jumlah tersebut, permasalahan terkait pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu fokus dari Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tidak hanya Indonesia, hal pengentasan kemiskinan menjadi fokus dari negara-negara di

seluruh dunia yang tercantum dalam tujuan berkelanjutan yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kemiskinan yang menjadi permasalahan saat ini tentu saja menimbulkan dampak yang cukup serius, seperti kesenjangan/ketimpangan sosial yang semakin besar antara si miskin dan si kaya. Menurut (Kemenkeu, 2015), empat penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial di Indonesia yang harus segera diselesaikan, yaitu : (1) Ketimpangan peluang : Ketimpangan yang tercermin bagi anak-anak yang terlahir di keluarga yang miskin yang terpengaruh atas tempat mereka dilahirkan ataupun pendidikan terakhir yang ditempuh orang tuanya. Sehingga awal yang tidak adil dapat menentukan kurangnya peluang bagi mereka selanjutnya. (2) Ketimpangan pasar tenaga kerja : Ketimpangan yang dialami oleh para pekerja dengan salah satu pekerja dapat mengembangkan keterampilan mereka pada suatu pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Sementara pekerja lainnya tidak dapat mengembangkan keterampilan mereka dan hanya dapat bekerja di sektor yang memiliki gaji kecil. (3) Konsentrasi kekayaan : Yang menunjukkan bahwa masyarakat kaya memiliki sebagian aset dari suatu perusahaan seperti saham. Hal ini tentu akan membuat masyarakat yang memiliki modal awal akan semakin kaya sehingga mendorong terjadinya ketimpangan sosial. (4) Ketimpangan dalam menghadapi guncangan : Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin ketika mendapat guncangan akan merasakan dampak yang lebih lama dibandingkan masyarakat kaya. Sebut saja ketika terjadi bencana, dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin akan ditanggung lebih lama dan mengalami lebih banyak risiko, seperti hilangnya pemasukan, jaminan kesehatan, hingga layanan pendidikan.

Kemiskinan juga menjadi salah satu fokus *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang merupakan suatu tujuan pembangunan berkelanjutan bagi setiap negara. SDGs pertama kali dicetuskan pada konferensi PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012 dan diresmikan saat konferensi PBB pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat (Vernon, 2015). Dari pertemuan PBB tersebut, menghasilkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi

fokus untuk memperbaiki tantangan yang bersifat mendesak pada setiap negara di seluruh dunia, antara lain : *no poverty; zero hunger; good health and well-being; quality education; gender equality; clean water and sanitation; affordable and clean energi; decent work and economic growth; industry, inovation, and infrastructure; reduced inequalities; suistainable cities and communities; responsible consumption and production; climate action; life below water; life on land; peace, justice, and strong institutions; partnership for the goals.*

Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya SDGs. Dikutip dari (Vernon, 2015), kemiskinan menjadi permasalahan nomor satu yang harus diselesaikan. Dalam dokumen tersebut juga terdapat target untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di dunia pada tahun 2030. Indonesia yang menganut dan berkomitmen untuk mencapai SDGs telah menetapkan peraturan untuk mengatur pelaksanaan SDGs dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Perpres tersebut, disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai SGD's global, yakni pada tahun 2016-2030. Adapun koordinator pelaksana dari SDGs di Indonesia adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertulis pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 pasal 9 ayat (2).

Pelaksanaan SDGs di Indonesia untuk menurunkan tingkat kemiskinan terbukti sudah cukup baik, namun masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di tahun 2016-2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Indonesia hingga tahun 2021, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.1 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta penduduk)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
2016	28,01	10,86
2017	27,77	10,64
2018	25,95	9,82
2019	25,14	9,41
2020	26,42	9,78
2021	27,54	10,14

Sumber : BPS, Data diolah

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa setelah dilaksanakannya SDGs pada tahun 2016, jumlah dan persentase penduduk miskin mulai menurun hingga tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 jumlah dan persentase penduduk miskin kembali melonjak hingga mencapai angka 9,78%, yakni 26,42 juta jiwa penduduk miskin pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga angka 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa penduduk miskin pada tahun 2021. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Seperti yang telah kita tahu, bahwasanya Covid-19 merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan dan ditakuti saat ini. Penyakit yang berasal dari Kota Wuhan, China ini bermula pertama kali di awal Desember tahun 2019 dari Pasar Ikan Huanan yang juga menjual binatang liar di kota tersebut. Covid-19 sendiri mulai masuk di Indonesia pada akhir Februari 2020 lewat 2 orang WNI yang terkena gejala ketika menghadiri acara pesta dansa dan diumumkan sebagai virus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Velarosdela, 2021). Virus yang menyerang paru-paru ini, hingga tanggal 12 April 2021 telah mencapai sebanyak 134.957.021 kasus di dunia dengan jumlah total kasus meninggal sebanyak 2.918.752 (WHO, 2021). Indonesia yang menjadi negara dengan penyebaran Covid-19 terbanyak ke-19 hingga April 2021 ini, dengan total sebanyak 1.562.868 kasus positif Covid-19 dan kasus meninggal akibat Covid-19 sebanyak 42.443 kasus (WHO, 2021). Adanya pandemi Covid-19

ini menimbulkan banyak permasalahan pada sektor-sektor yang terdampak. Hampir keseluruhan sektor pada negara menjadi dampak dari penyebaran pandemi Covid-19 ini, seperti : pendidikan, ekonomi, politik, pariwisata, seni budaya dan lain sebagainya. Di sektor pendidikan dan politik, pengaruh yang didapat lebih kepada pelaksanaan kegiatan pendidikan maupun pemerintahan. Kegiatan pendidikan dan pemerintahan yang awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi kegiatan yang berbasis *online* dengan menggunakan media digital untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Di sektor ekonomi dan pariwisata, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang cukup besar yaitu dengan hilangnya sebagian besar mata pencaharian dari masyarakat karena Covid-19. Sektor pariwisata tidak bisa berkembang sama sekali untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan Covid-19 memiliki tingkat penyebaran yang tinggi dan penularan yang tergolong mudah yakni melalui kontak fisik. Sehingga pemerintah menerapkan aturan dan menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di dalam rumah dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 yang sangat cepat. Hal ini tentu menyebabkan dampak negatif pada perekonomian di Indonesia. Beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1 : Persentase penurunan pendapatan karena dampak pandemi Covid-19

Sumber : Bisnis.com

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar lapangan usaha telah terdampak pandemi Covid-19. Dengan angka penurunan pendapatan tertinggi didapati oleh sektor akomodasi dan makan minum yang merupakan jasa penginapan dan penyediaan tempat makan minum seperti restoran dan kafe yang memiliki penurunan pendapatan sebanyak 92,47%. Disusul oleh jasa lainnya yang merupakan jasa yang bergerak pada bidang yang mengutamakan kepada keterampilan, seperti sopir, *office boy*, satpam, dan sebagainya yang mengalami penurunan pendapatan sebanyak 90,90%. Selanjutnya disusul oleh jasa transportasi dan pergudangan yang mengalami penurunan pendapatan sebanyak 90,34%. Lalu di bidang konstruksi yang bergerak pada pendirian bangunan ataupun pembuatan wujud fisik lainnya mengalami penurunan pendapatan sebesar 87,94% karena berhentinya kegiatan pembangunan infrastruktur di masa pandemi Covid-19. Kemudian disusul oleh industri pengolahan dengan penurunan pendapatan sebanyak 85,98% dan sektor Perdagangan sebanyak 84,60%.

Sedangkan di sektor ketenagakerjaan, ribuan pekerja telah mengalami PHK massal yang diakibatkan karena turunnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan dan harus memenuhi kewajiban untuk membayar para pegawainya. Selain itu, penetapan aturan yang melarang para pekerja untuk bekerja secara penuh dan harus mengurangi jam kerja dari para pekerja juga membuat sebagian pekerja diliburkan sementara. Dilansir dari situs [katadata.co.id.](https://katadata.co.id/), BPS mencatat terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 pada Agustus tahun 2020. Mereka mengalami pengurangan jam kerja serta menjadi pengangguran dikarenakan adanya PHK. Kepala BPS Indonesia, Suhariyanto mengatakan "Angka tersebut merupakan 14,28% dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta, jadi itu tidak dilihat hanya dari pengangguran saja" (Victoria, 2020). Beliau juga mengatakan bahwa Dampak dari pandemi Covid-19 tersebut terdiri dari 2,56 juta orang yang menjadi pengangguran dengan perincian sebanyak 760 ribu orang menjadi bukan angkatan kerja dan sebanyak 1,77 juta orang menjadi tidak bekerja sementara karena dirumahkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dari berbagai penurunan pendapatan tersebut, tentu mengakibatkan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi meningkat. Salah satu faktor utama penyebab tingginya kemiskinan di Indonesia adalah jumlah angka pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi karena banyak terjadinya PHK. Pengangguran merupakan jumlah masyarakat angkatan kerja yang tidak bekerja, hal ini diakibatkan oleh minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran juga sering diakibatkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, seperti : PHK dan kebangkrutan. Sedangkan angkatan kerja merupakan seluruh masyarakat yang memiliki usia 15-65 tahun dan sudah siap untuk dipekerjakan. Dikutip dari (Badan Pusat Statistik, 2021), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami peningkatan pada Agustus 2020 akibat pandemi Covid-19 dengan persentase TPT sebanyak 7,07%. Hal ini meningkat dari bulan Februari 2020 yang tampak bahwa data TPT di Indonesia memiliki persentase sebanyak 4,94%. Namun seiring dengan menurunnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, TPT di Indonesia juga perlahan mulai menurun. Tercatat pada bulan Februari 2021, persentase TPT di Indonesia mengalami penurunan hingga mencapai angka 6,26%, dan kembali mengalami peningkatan pada Agustus 2021 dengan persentase TPT sebesar 6,49%.

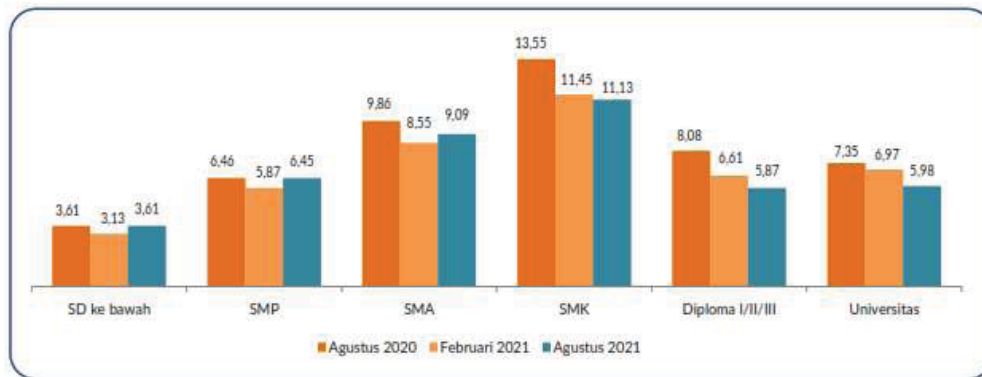
Tabel I.2 : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2020-2021 menurut daerah dan jenis kelamin

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		2020		2021	
		Februari (persen)	Agustus (persen)	Februari (persen)	Agustus (persen)
Menurut Daerah	Perkotaan	6,12	8,98	8,00	8,32
	Pedesaan	3,49	4,71	4,11	4,17
Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	5,13	7,46	6,81	6,74
	Perempuan	4,65	6,46	5,41	6,11
Jumlah		4,94	7,07	6,26	6,49

Sumber : BPS, Data diolah

Berdasar dari data (Badan Pusat Statistik, 2021a), jumlah TPT di Indonesia didominasi oleh lulusan SMK dengan persentase sebanyak 11,13%,

sedangkan lulusan SD ke bawah memiliki persentase TPT terendah dengan angka 3,61% pada Agustus 2021. Urutan persentase penyumbang TPT berdasarkan lulusan pendidikan tertinggi dari tertinggi ke terendah, adalah sebagai berikut : SMK (11,13%); SMA (9,09%); SMP (6,45%); Universitas (5,98%); Diploma I/II/III (5,87%); dan SD ke bawah (3,61%). Hal tersebut dapat dilihat pada grafik I.1 di bawah ini.



Grafik I.1 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2020-2021 Menurut Pendidikan Terakhir

Sumber : BPS

Dari grafik tersebut, didapati bahwa TPT pada lulusan SMK, Diploma I/II/III, dan Universitas cenderung mengalami penurunan dari bulan Agustus 2020 hingga Agustus 2021. Sedangkan TPT pada lulusan SMA, SMP, dan SD ke bawah memiliki grafik penurunan dari Agustus 2020 ke Februari 2021, namun kembali mengalami peningkatan pada Agustus 2021.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki persentase TPT di Indonesia yang cukup besar. Sebanyak 5,74 % penduduk usia kerja di Jawa Timur tergolong sebagai penduduk yang tidak bekerja atau disebut pengangguran pada Agustus 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021a). Jawa Timur juga merupakan provinsi dengan persentase TPT terbesar nomor 14 di Indonesia pada Agustus 2021, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.3 : Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Indonesia
Pada Tahun 2020-2021**

No.	Provinsi	TPT Menurut Provinsi (persen)			
		2020		2021	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Kep. Riau	5.98	10.34	10.12	9.91
2	Jawa Barat	7.71	10.46	8.92	9.82
3	Banten	7.99	10.64	9.01	8.98
4	DKI Jakarta	5.15	10.95	8.51	8.50
5	Sulawesi Utara	5.34	7.37	7.28	7.06
6	Maluku	6.71	7.57	6.73	6.93
7	Kalimantan Timur	6.72	6.87	6.81	6.83
8	Sumatera Barat	5.25	6.88	6.67	6.52
9	Sumatera Utara	4.71	6.91	6.01	6.33
10	Aceh	5.40	6.59	6.30	6.30
11	Jawa Tengah	4.20	6.48	5.96	5.95
12	Papua Barat	6.78	6.80	6.18	5.84
13	Kalimantan Barat	4.47	5.81	5.73	5.82
14	Jawa Timur	3.60	5.84	5.17	5.74
15	Sulawesi Selatan	5.70	6.31	5.79	5.72
16	Bali	1.25	5.63	5.42	5.37
17	Jambi	4.26	5.13	4.76	5.09
18	Kep. Bangka Belitung	3.35	5.25	5.04	5.03
19	Sumatera Selatan	3.90	5.51	5.17	4.98
20	Kalimantan Selatan	3.67	4.74	4.33	4.95
21	Maluku Utara	4.09	5.15	5.06	4.71
22	Lampung	4.26	4.67	4.54	4.69
23	Kalimantan Utara	5.71	4.97	4.67	4.58
24	DI Yogyakarta	3.38	4.57	4.28	4.56
25	Kalimantan Tengah	3.33	4.58	4.25	4.53
26	Riau	4.92	6.32	4.96	4.42
27	Sulawesi Tenggara	3.10	4.58	4.22	3.92
28	Nusa Tenggara Timur	2.64	4.28	3.38	3.77
29	Sulawesi Tengah	2.93	3.77	3.73	3.75
30	Bengkulu	3.08	4.07	3.72	3.65
31	Papua	3.42	4.28	3.77	3.33
32	Sulawesi Barat	2.39	3.32	3.28	3.13

33	Nusa Tenggara Barat	3.04	4.22	3.97	3.01
34	Gorontalo	3.29	4.28	3.41	3.01

Sumber : BPS, Data Diolah

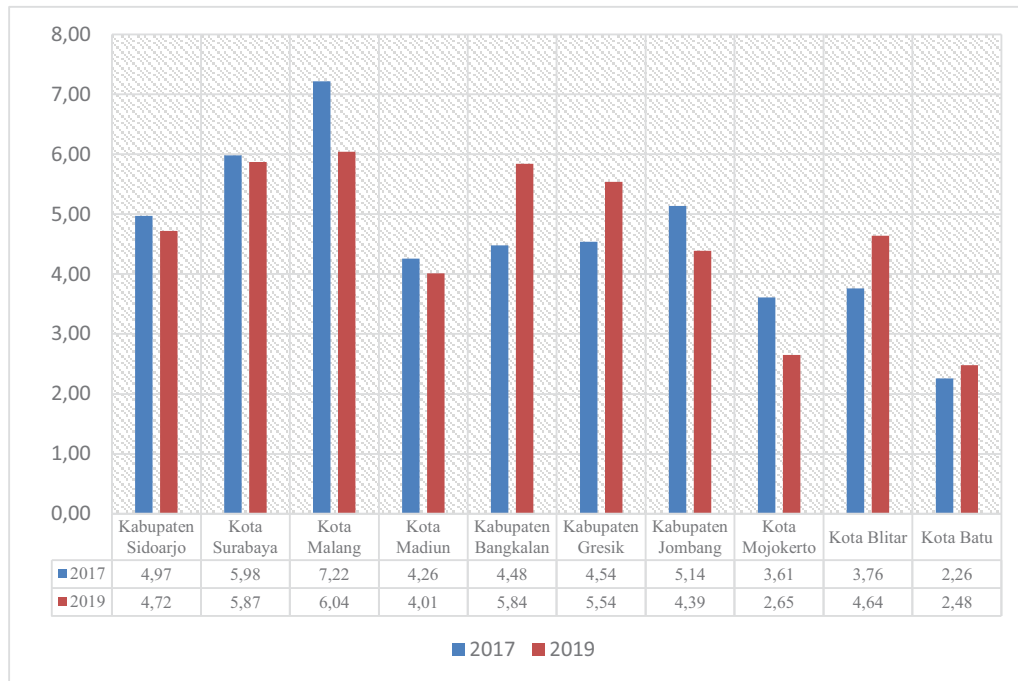
Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan terbanyak kedua pada Agustus 2021 setelah Provinsi Jawa Barat. Tercatat bahwa Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan persentase pengangguran sebanyak 0,57%, lebih sedikit dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki peningkatan persentase pengangguran sebanyak 0,9%. Para Provinsi Jawa Timur, pengangguran terbuka masih didominasi oleh Kabupaten/Kota yang cukup besar, berikut merupakan data dari 10 Kabupaten/Kota yang memiliki persentase TPT terbesar di Jawa Timur pada tahun 2021.

Tabel I.4 : 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2019-2021

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur (persen)		
		2019	2020	2021
1.	Kabupaten Sidoarjo	4,72	10,97	10,87
2.	Kota Surabaya	5,87	9,79	9,68
3.	Kota Malang	6,04	9,61	9,65
4.	Kota Madiun	4,01	8,32	8,15
5.	Kabupaten Bangkalan	5,84	8,77	8,07
6.	Kabupaten Gresik	5,54	8,21	8,00
7.	Kabupaten Jombang	4,39	7,48	7,09
8.	Kota Mojokerto	2,65	6,74	6,87
9.	Kota Blitar	4,64	6,68	6,61
10.	Kota Batu	2,48	5,93	6,57

Sumber : BPS, Data Diolah

Dari 10 Kabupaten/Kota yang memiliki persentase TPT tertinggi tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan beberapa tren positif seperti terjadinya penurunan persentase TPT pada tahun 2021 yang sempat meningkat pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Sedangkan sebelum pandemi Covid-19 menyerang, 10 Kabupaten/Kota tersebut cenderung mengalami penurunan pada persentase TPT seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik I.2 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur pada 10 Kabupaten/Kota dengan TPT Tertinggi di Jawa Timur Sebelum Tahun 2021

Sumber : BPS, Data diolah

Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 10 Kabupaten/Kota yang memiliki persentase TPT terbesar di Jawa Timur pada tahun 2021 6 Kabupaten/Kota telah berhasil mengurangi TPT pada periode 2017-2019, di antaranya adalah : Kabupaten Sidoarjo (-0,25%), Kota Surabaya (-0,11%), Kota Malang (-1,18%), Kabupaten Madiun (-0,25%), Kabupaten Jombang (-0,75%), dan Kota Mojokerto (-0,96%).

Kabupaten Jombang yang termasuk 10 Kabupaten/Kota dengan persentase TPT terbesar di Jawa Timur pada tahun 2021. Menempati urutan ketujuh dalam persentase TPT tertinggi di Jawa Timur, persentase TPT di Kabupaten Jombang pada tahun 2021 adalah 7,09%, turun 0,39% dari tahun 2020 dengan persentase TPT sebesar 7,48%. Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2018-2023, Disnakertrans Kabupaten Jombang telah membuat 2 indikator sasaran untuk menurunkan TPT di Kabupaten

Jombang, salah satunya adalah untuk meningkatkan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan target seperti pada tabel berikut :

Tabel I.5 : Target capaian pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023

Indikator	Kondisi Tahun Awal RPJMD (persen)	Target Capaian Setiap Tahun (persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,86 %	70,33%	70,80%	71,27%	71,74%	72,21%

Sumber : RPJMD Kab. Jombang tahun 2018-2023

Dari data tersebut, diperoleh bahwa target persentase TPAK pada Kabupaten Jombang di tahun 2020 adalah sebanyak 70,80%. Sedangkan data yang ditemukan di lapangan, persentase TPAK di Kabupaten Jombang pada tahun 2020 adalah sebesar 70,23% yang hanya memiliki selisih sedikit dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi lanjut yang telah dilakukan oleh BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jombang pada tahun 2020 didominasi oleh lulusan SMK dengan persentase sebanyak 11,52% (BPS Jombang, 2021). Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang cukup berat, karena lulusan SMK notabene memiliki bekal berupa kemampuan bekerja di bidangnya malah menyumbang persentase terbesar bagi angka pengangguran .

Sebenarnya dalam mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia, sudah dibentuk Program Antar Kerja. Antar Kerja sendiri merupakan suatu program yang berisi pelayanan untuk penempatan tenaga kerja baik secara lokal (Antar Kerja Lokal), antar daerah (Antar Kerja Antar Daerah), maupun lintas negara (Antar Kerja Antar Negara). Program Antar Kerja ini pertama kali muncul di tahun 1970 dengan memiliki 2 komponen program, yaitu Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yang diatur pada PP No. 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja (BP2MI,

2020). Kemudian dicantumkan dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang definisi dan bentuk pelayanan program. Dalam mengatur mekanisme pelaksanaannya, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Program Antar Kerja sendiri merupakan pelayanan nasional yang dimiliki oleh setiap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di daerah. Dengan adanya program ini, merupakan suatu terobosan bagi para pencari kerja agar bisa mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat (Brojo, 2012). Menurut Brojo, Dengan bergulirnya regulasi pemerintah terkait dengan Program Antar Kerja diharapkan dapat menjadi suatu poin untuk pemerataan kesempatan kerja. Program ini juga memiliki tujuan untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu daerah sehingga didatangkan dari daerah lainnya dengan menggunakan metode verifikasi atau mencocokkan kualifikasi pencari kerja dengan persyaratan lowongan pekerjaan yang telah tersedia dengan gratis. Program Antar Kerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dalam peraturan tersebut, telah dicantumkan pada pasal 1 ayat (3) bahwasanya Antar Kerja merupakan salah satu bentuk sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.

Pelaksana pelayanan Antar Kerja sendiri telah diatur dalam pasal 12, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yaitu Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan lembaga swasta yang berbadan hukum. Instansi yang dimaksud tersebut tidak lain adalah Kementerian Tenaga Kerja untuk skala nasional, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk skala Provinsi, dan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk skala Kabupaten/Kota. Kabupaten Jombang sendiri merupakan salah satu kabupaten yang juga menjalankan Program Antar Kerja ini. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Jawa Timur yang memiliki tingkat pengangguran yang lebih besar dari Kabupaten Jombang pada tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang hanya dapat menyalurkan sebanyak 58% pencari kerja di tahun 2020 (BPS Jombang, 2022). Angka tersebut masih kalah dengan penyaluran kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebanyak 74,4% pada tahun 2020 (Pemerintah Kota Surabaya, 2020). Selain itu, pencapaian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang masih kalah dibandingkan Kabupaten Bangkalan yang menduduki urutan ke lima persentase pengangguran terbuka di Jawa Timur. Dilansir dari kabarmadura.id, disampaikan bahwa dalam tahun 2020, jumlah pencari kerja di Kabupaten Bangkalan cenderung kecil, yaitu sebanyak 134 orang. Dari jumlah tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan dapat menempatkan sebanyak 134 orang tersebut untuk bekerja (Alfarisi, 2020). Adapun Kota Madiun yang menempati posisi ke empat dalam persentase pengangguran terbesar di Jawa Timur memiliki dapat menempatkan 60,95% % pencari kerja yang berjumlah 3,002 orang. Dilansir dari portal Satu Data Kabupaten Madiun, jumlah pencari kerja yang mendaftar dan berhasil menempatkan sebanyak 1,830 orang (Pemerintah Kota Madiun, 2020). Adapun salah satu penempatan tenaga kerja yang cukup baik dari Kota Malang, yakni sebanyak 647 orang dan tercapai 90,39% di tahun 2020 (Pemerintah Kota Malang, 2020). Adapun Kabupaten Gresik yang memiliki jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 428 orang yang keseluruhan dapat ditempatkan pada perusahaan industri (Badan Pusat Statistik, 2020). Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki angka penempatan kerja yang cukup baik dengan mencatatkan hasil 96,44% (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2021). Dari data tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang memiliki program penempatan tenaga kerja yang masih kalah dari 5 Kabupaten/Kota lain yang termasuk dalam 10 besar pemilik pengangguran tertinggi di Jawa Timur, seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel I.6 : Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Tenaga Kerja
1.	Kabupaten Sidoarjo	96,44%
2.	Kota Surabaya	74,4%
3.	Kota Malang	90,39%
4.	Kota Madiun	60,95%
5.	Kabupaten Bangkalan	100%
6.	Kabupaten Gresik	100%
7.	Kabupaten Jombang	58%

Sumber : Data diolah

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa penempatan tenaga kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang masih sangat buruk dibandingkan kabupaten lainnya yang memiliki persentase tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari Kabupaten Jombang.

Untuk Kabupaten Jombang sendiri, dinas yang menaungi pelayanan Antar Kerja ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jombang. Pada Disnakertrans Kabupaten Jombang, Bidang yang menaungi pelayanan Antar Kerja adalah bidang penempatan, perluasan kerja, dan transmigrasi yang tertera dalam Pasal 10 dari Peraturan Bupati Jombang No. 28 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.

Selain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, program Antar Kerja juga dilaksanakan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Disebutkan pada pasal 31 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, bahwa penempatan kerja selain dilakukan oleh pihak yang ada pada pasal 16 juga dilakukan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK). BKK merupakan suatu lembaga yang dibentuk pada Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai lowongan kerja, pelaksana pemasaran, serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja (Kemdikbud, 2009). BKK ini merupakan suatu lembaga yang bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan informasi terkait lowongan kerja serta menyalurkan tenaga kerja yang merupakan siswa/siswi maupun lulusan SMK kepada perusahaan yang membutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pembentukan dan pelaksanaan BKK ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No. 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karier Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa BKK merupakan lembaga yang dibentuk di SMK, Politeknik/Universitas, dan Lembaga pelatihan yang menjadi mitra lembaga pemerintahan sebagai unit pelaksana yang memberikan layanan kepada peserta didik dan lulusannya berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta penyaluran dan penempatan kerja.

Menurut (Mamduh, 2021), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jombang berupaya untuk meningkatkan pelayanan pada program Antar Kerja dan Rapat Koordinasi dalam Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dimiliki oleh SMK-SMK di Kabupaten Jombang untuk mengurangi tingkat pengangguran bagi lulusan SMK di Kabupaten Jombang. Namun, program Antar Kerja yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Kabupaten Jombang yang bermitra dengan BKK masih belum dapat mencapai tujuan awal, yaitu mengurangi tingkat pengangguran terutama dari lulusan SMK, hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase TPT bagi lulusan SMK pada beberapa tahun terakhir di Kabupaten Jombang, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel I.7 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Kabupaten Jombang Pada Tahun 2017-2020

Pendidikan Terakhir	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan Terakhir			
	2017	2018	2019	2020
<= SD	3,56	2,22	4,34	5,57
SMP	5,87	7,72	3,07	8,07
SMA	6,33	3,43	5,82	8,60
SMK	8,08	5,57	6,18	11,52
Diploma I/II/III	19,72	11,55	0,00	0,00
Sarjana	0,00	5,52	2,28	3,87
Jumlah	5,14	4,64	4,39	7,48

Sumber : BPS, Data diolah

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa lulusan SMK memiliki persentase pengangguran terbesar di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing dengan jumlah persentase sebanyak 6,18% di tahun 2019 dan 11,52% pada tahun 2020. Tahun 2020 menjadi tahun terbanyak bagi lulusan SMK menganggur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017-2018 persentase pengangguran bagi lulusan SMK cenderung menurun, namun pada tahun 2019 persentase pengangguran bagi lulusan SMK mengalami peningkatan hingga pada puncaknya tahun 2020 dengan persentase sebanyak 11,52%. Sehingga peneliti bermaksud untuk meneliti “Evaluasi Program Antar Kerja Yang Bermitra Dengan Bursa Kerja Khusus Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Lulusan SMK”.

Tabel I.8 : Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
Implementasi Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dalam Menempatkan Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	Rani Gabrella	Pelaksanaan program AKAD di Sumatera Utara masih memiliki banyak kekurangan yang dinilai dengan empat indikator, yaitu : 1. Kondisi Lingkungan Masyarakat hidupnya bergantung dari pertanian dan dapat digolongkan minim

		pengalaman bekerja; 2. Hubungan Organisasi Disnaker Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan PT. Asisten Rumah Indonesia sebagai perusahaan yang dinaungi oleh LPTKS AKAD dan sudah memiliki hubungan baik, Namun komunikasi antara Disnaker Provinsi Sumatera Utara dengan LPTKS AKAD masih belum optimal, ditandai dengan tidak adanya data pasti mengenai jumlah LPTKS AKAD di Kota Medan; 3. Sumber daya Organisasi Dari segi SDM, LPTKS AKAD mendapatkan bantuan SDM dari Disnaker Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengurusan SIU LPTKS AKAD serta Surat Persetujuan Penempatan (SPP) tenaga kerja AKAD. Namun dalam sumber daya keuangan, tidak ada anggaran dari pemerintah terkait program tersebut, sehingga pencari kerja menggunakan biaya pribadi yang dibayarkan kepada PT. Asisten Rumah Tangga Indonesia; 4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana Disnaker Provinsi Sumatera Utara masih belum memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pengawasan pada pihak LPTKS AKAD, serta penyikapan terhadap SK Moratorium dari Pemerintah Nusa Tenggara Timur selaku mitra dari PT Asisten Rumah Indonesia yang menyebabkan program tidak berjalan.
Implementasi Kebijakan Pelayanan	Siti Mardianti	Pelaksanaan pelayanan AK/I – AK/V masih belum optimal dengan

AK/I – AK/V di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang		beberapa permasalahan, seperti : 1. Buruknya komunikasi pada pelayanan AK/I – AK/V; 2. Minimnya sosialisasi; 3. Fasilitas yang kurang memadai; 4. Pejabat daerah hanya memiliki wewenang untuk menjalankan pelayanan AK/I saja; 5. Perbedaan persepsi dalam implementasi kebijakan dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; 6. Birokrasi pelayanan yang masih rumit dan menghambat pelaksanaan program.
Evaluasi Program Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK di Kabupaten Bekasi	Sumarno dan Wardani Rahayu	1. Dalam pelaksanaan program BKK, tidak ada satu pun sekolah yang menyusun pedoman pelaksanaan program BKK. 2. Tidak terdapat tenaga pemandu yang terlatih di Disnaker Kabupaten Bekasi untuk membina program BKK di sekolah 3. Jabatan dari pengurus BKK yang sering dirotasi dan jumlah pengurus BKK di sekolah yang tidak memadai, dan disebabkan oleh : (1) Guru tidak bisa dijadikan pengurus, karena aktivitas mengajar yang padat serta banyaknya tugas; (2) Minimnya anggaran untuk menggunakan tenaga khusus untuk menjadi pengurus BKK.
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017	Siti Hidayatul Jumaah dan Rahmawati Husein	Terdapat sejumlah permasalahan pada TKI yang berasal dari Kabupaten Lombok, seperti : (1) Menjadi TKI ilegal; (2) Pengalihan tempat kerja tanpa alasan yang jelas; (3) Meninggal dunia karena disiksa; (4) Menjadi korban kriminalitas; (5) Melampaui izin tinggal.

		Permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanganan TKI di Kabupaten Lombok, antara lain : 1. Jumlah dan kualitas SDM yang tidak memadai dalam menangani permasalahan tersebut; 2. Waktu penyelesaian masalah yang cukup lama karena rendahnya kualitas SDM, laporan dan pengajuan yang tidak didukung data yang memadai, serta tidak ada bantuan dari BP3TKI Mataram yang ada di Lombok.
<i>Economic and Social Well-Being of Asian Labour Migrants : A Literature Review</i>	Md. Mohsin Reza, Thirunaukarasu Subramaniam, dan M. Rezaul Islam	Dalam implikasi kebijakan, peneliti mendapatkan temuan bahwa sebagian besar negara perekrut pekerja tidak memiliki komitmen terhadap peraturan dalam melindungi kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi pekerja.
<i>Assessing youth labour market services: Young people's perceptions and evaluations of service delivery in Germany</i>	Jennifer Shore dan Jale Tosun	<i>Public Employment Services (PES)</i> merupakan organisasi yang bergerak dalam mengatasi pengangguran di Eropa. Namun dalam pelaksanaan program pelayanannya, <i>PES</i> masih memiliki kekurangan dalam pelayanan yang diberikan terhadap tenaga kerja muda, sehingga beberapa kelompok pemuda di Jerman merasa tidak puas. Namun hasil baiknya, pengalaman pemuda dalam menggunakan layanan <i>PES</i> turut memengaruhi optimisme pemuda dalam mencari pekerjaan.

Dalam tabel penelitian terdahulu tersebut, masih belum ditemukan artikel yang membahas tentang evaluasi Program Antar Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dan Bursa Kerja Khusus pada SMK di Kabupaten Jombang. Selain itu, penelitian sebelumnya juga membahas terkait Program Antar Kerja yang berfokus pada implementasi program, kendala

pelaksanaan program, evaluasi program yang berbeda, serta lokasi pelaksanaan program yang berbeda. Dalam penelitian yang berjudul evaluasi Program Antar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang bermitra dengan Bursa Kerja Khusus untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMK di Kabupaten Jombang ini, memiliki fokus pada Program Antar Kerja yang dilakukan baik secara lokal (lintas kabupaten), antar daerah (lintas provinsi), dan antar negara (lintas negara).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi Program Antar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bermitra dengan Bursa Kerja Khusus untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMK di Kabupaten Jombang?”.

I.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dari tujuan Program Antar Kerja dengan hasil program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang yang bermitra dengan Bursa Kerja Khusus untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMK di Kabupaten Jombang.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, memiliki dua manfaat yang dikategorikan sebagai berikut :

I.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan terkait penelitian lainnya yang mengusung topik evaluasi Program Antar Kerja. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pelayanan Antar Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.

I.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan dalam optimalisasi program Antar Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.

I.5 Landasan Teori

I.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu bentuk tindakan atau keputusan yang dibuat dan ditetapkan untuk menangani suatu permasalahan ataupun menjawab tantangan tertentu. Menurut Greer dan Paul Hoggett, dalam (Handoyo, 2012) memaknai bahwasanya kebijakan merupakan suatu tindakan ataupun bukan tindakan yang lebih dari keputusan spesifik yang digunakan dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan pendapat lebih kompleks diungkapkan oleh Friedrich dalam (Handoyo, 2012) yang mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah guna mencapai suatu tujuan dalam lingkup tertentu sehubungan dengan adanya hambatan yang diikuti dengan pencarian peluang dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Eko pun menjelaskan bahwa kebijakan memiliki 2 arti, yaitu arti umum dan arti spesifik. Kebijakan dalam arti umum merupakan suatu tindakan atau keputusan yang bermaksud untuk memberikan arah, koherensi dan kontinuitas (Handoyo, 2012). Sedangkan dalam arti spesifik, kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) serta tujuan (*ends*) dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan cara, sarana, serta target dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan publik merupakan suatu kata yang memiliki makna masyarakat luas dalam suatu cakupan wilayah tertentu. Gobetti dalam (Handoyo, 2012) menyatakan bahwa istilah privat memiliki kaitannya dengan individu atau person, sedangkan publik merujuk kepada suatu masyarakat pada suatu daerah atau negara. Menurut Dye dan Anderson dalam (Handoyo, 2012), kebijakan publik merupakan sebuah pilihan terkait sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan publik. Sependapat dengan Dye dan Anderson, Edward III dan Sharkansky dalam (Handoyo, 2012) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan ataupun keputusan yang diambil oleh pemerintah baik untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal. Jika pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu hal, tentu akan berkaitan dengan cara, sarana, dan target untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat umum.

I.5.1.1 Program Antar Kerja

Program Antar Kerja merupakan suatu program yang dibentuk pemerintah untuk melakukan perluasan kerja (Brojo, 2012). Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan pada pasal 39 ayat (1) bahwa Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Tujuan utama dari program Antar Kerja sendiri adalah untuk melakukan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan kebutuhan dari pemberi kerja. Selain itu, program Antar Kerja juga memudahkan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan baru, sehingga program Antar Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan perluasan kerja. Dengan mekanisme penghimpunan data para pencari kerja dan memberikan Informasi Pasar Kerja (IPK) kepada masyarakat, program Antar Kerja dinilai akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan data yang ada.

Program Antar Kerja ini pertama kali muncul pada tahun 1970 dengan memiliki 2 komponen program, yaitu Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yang diatur pada PP No. 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja, yang pada saat itu Republik Indonesia memiliki kebutuhan untuk melakukan penempatan kerja pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri (BP2MI, 2020). Program ini selengkapanya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula mekanisme pelayanan penempatan kerja bagi masyarakat pada BAB V Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 37-40, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara manual maupun *online* yang terintegrasi dengan sistem penempatan tenaga kerja nasional melalui SISNAKER.
- b) Bagi pencari kerja, diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja (AK/I) dengan membawa berkas, seperti :
 - Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - Fotokopi ijazah pendidikan terakhir bagi yang memiliki;
 - Fotokopi sertifikat keterampilan bagi yang memiliki; dan
 - Fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- c) Pencari kerja yang telah mendaftarkan diri dengan mengumpulkan berkas yang sudah ditentukan akan mendapatkan kartu pencari kerja (AK/1) yang berlaku secara nasional.
- d) Kartu pencari kerja (AK/1) berlaku selama 2 tahun dengan kewajiban pencari kerja dengan keharusan melapor selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran bagi pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan. Sedangkan yang sudah mendapatkan pekerjaan diwajibkan melapor bahwa telah diterima bekerja pada instansi yang bertanggung jawab di kabupaten/kota.
- e) Pengantar kerja (dinas yang bertanggung jawab) wajib melakukan pengisian data pada formulir AK/II melalui wawancara dengan pihak pencari kerja untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan dari pencari kerja.

- f) Pengantar kerja (dinas yang bertanggung jawab) wajib melakukan pencatatan daftar isian permintaan tenaga kerja (AK/III) setelah menerima dan/atau mencari lowongan kerja serta menerbitkan bukti lapor lowongan pekerjaan.
- g) Dalam pemenuhan permintaan tenaga kerja, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib melakukan pemanggilan kepada pencari kerja dengan menggunakan kartu antar kerja (AK/IV).
- h) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib mengirimkan pencari kerja kepada pemberi kerja dengan membawa kartu antar kerja (AK/V).

I.5.1.2 Bursa Kerja Khusus

Pusat pengembangan karier siswa atau Bursa Kerja Khusus (BKK) merupakan lembaga yang dibentuk di SMK, Politeknik/Universitas, dan Lembaga pelatihan yang menjadi mitra dari pemerintah sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan berupa Informasi Pasar Kerja (IPK), Pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja (Kemdikbud, 2009). BKK merupakan lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi mitra dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pencarian kerja. Bagi SMK sendiri, BKK memiliki tujuan untuk memperluas pencarian kerja dengan proses verifikasi terkait jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan industri dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik maupun lulusan dari SMK. Adapun tujuan dari dibentuknya BKK menurut Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No. 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karier Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020, antara lain :

- a) Melakukan pembimbingan karier pada peserta didik sesuai tuntutan dunia kerja;
- b) Penyelenggaraan dan penguatan Bursa Kerja Khusus;
- c) Menjembatani kerja sama antara sekolah dan dunia kerja;

- d) Memberikan layanan informasi lowongan kerja;
- e) Menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan yang meliputi :
Tingkat kompetensi, Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Waktu;
- f) Pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja;
- g) Menyelenggarakan layanan konsultasi bagi peserta didik yang masih belajar dan/atau lulusan;
- h) Memberikan advokasi sekolah sekitar/sekolah imbasan dan mendorong SMK lain membentuk Bursa Kerja Khusus.

Dalam pelayanan penempatan kerja, Bursa Kerja Khusus (BKK) juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 51 ayat (1) dan (2), yang di dalamnya diatur tentang pemberi kerja yang membutuhkan pekerja lewat BKK wajib mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan yang dimaksud ialah dengan mengajukan permohonan sembari melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota dengan tujuan penempatan tenaga kerja. Di Kabupaten Jombang, jumlah SMK yang tersebar sebanyak 69 SMK dengan rincian sebanyak 8 SMK negeri dan 61 SMK swasta pada tahun 2021 (BPS Jombang, 2021). Dari jumlah tersebut, terdapat 58 SMK memiliki lembaga BKK yang telah terdaftar dalam Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.9 : SMK yang memiliki Bursa Kerja Khusus dan terdaftar pada Kemdikbud di Kabupaten Jombang menurut Jurusan tahun 2021

No	Nama Sekolah	Jurusan
1	SMK 10 NOPEMBER JOMBANG	Teknik Pemesinan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik Komputer dan Jaringan
2	SMK AL - HIKMAH SUMOBITO	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

		Teknik Komputer dan Jaringan
3	SMK AL ASYARI DIWEK	Akuntansi dan Keuangan Lembaga
4	SMK AL IHSANI	Teknik Otomotif
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Bisnis Daring dan Pemasaran
5	SMK AL KARAMAH PETERONGAN	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
6	SMK AL KAUTSAR DIWEK	Teknik Otomotif
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Multi Media
7	SMK AL-MALIKUS SHOLEH	Teknik Komputer dan Jaringan
8	SMK ARRAHMAH	Multi Media
9	SMK BAKTI INDONESIA MEDIKA	Teknik Kimia
		Analisis Pengujian Laboratorium
		Asisten Keperawatan
		Teknologi Laboratorium Medik
		Farmasi Klinis dan Komunitas
10	SMK BISRI SYANSURI JOMBANG	Desain Grafika
		Bisnis Daring dan Pemasaran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
11	SMK BUDI UTOMO	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Audio Video
		Teknik Komputer dan Jaringan
		Multi Media
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Tata Busana
12	SMK CAKRA KUSUMA NGORO	Multi Media
13	SMK DARUL ULUM 1 PETERONGAN	Teknik Pemesinan
		Tata Busana
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
14	SMK DARUL ULUM KEPOHDOKO	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Kimia Industri
		Multi Media
15	SMK DARUSSALAM	Multi Media
16	SMK DIPONEGORO PLOSO	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
		Teknik Pemesinan
		Kimia Industri
17	SMK DWI DHARMA MOJOWARNO	Teknik Otomotif
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
18	SMK DWIJA BHAKTI 1 JOMBANG	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
		Teknik Pemesinan
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		Teknik Komputer dan Jaringan
19	SMK DWIJA BHAKTI 2	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Audio Video
20	SMK GAJAH MADA	Teknik Pemesinan
		Teknik Komputer dan Jaringan
21	SMK GLOBAL	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Otomotif Sepeda Motor
		Multi Media
		Tata Boga
		Seni Musik Populer
22	SMK IHSANNIAT NGORO	Teknik Komputer dan Jaringan
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
23	SMK ISLAM MBAH BOLONG	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
24	SMK KHOIRIYAH	Multi Media
		Bisnis Daring dan Pemasaran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
25	SMK KREATIF HASBULLAH	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

	BAHRUL ULUM	Teknik Elektronika Industri
		Tata Busana
		Tata Boga
		Animasi
26	SMK KUSUMA NEGARA	Teknik Pemesinan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Audio Video
27	SMK KYAI MOJO	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
		Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
28	SMK MAARIF NGORO	Teknik Komputer dan Informatika
		Bisnis Daring dan Pemasaran
29	SMK MANBAUL HUDA	Tata Busana
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
30	SMK MANUNGAL BHAKTI	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Perbankan dan Keuangan Mikro
31	SMK MATSNA KARIM	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik Komputer dan Jaringan
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
32	SMK MUHAMMADIYAH 1 NGORO	Teknik Otomotif
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Komputer dan Jaringan
33	SMK MUHAMMADIYAH 2 JOGOROTO	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
34	SMK MUHAMMADIYAH 3 MOJOAGUNG	Teknik Komputer dan Jaringan
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
35	SMK NAHDLATUL ULAMA 01 JOGOROTO	Farmasi
		Farmasi Industri
36	SMK NEGERI 1 JOMBANG	Multi Media

		Bisnis Daring dan Pemasaran
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Perbankan dan Keuangan Mikro
		Perhotelan
37	SMK NEGERI 2 JOMBANG	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
		Tata Busana
		Tata Boga
38	SMK NEGERI 3 JOMBANG	Teknik Geomatika
		Teknik Otomasi Industri
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik
		Teknik Pemesinan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik Audio Video
		Teknik Elektronika Industri
		Bisnis Konstruksi dan Properti
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		Teknik Komputer dan Jaringan
39	SMK NEGERI GUDO	Teknik Ototronik
		Teknik Komputer dan Jaringan
		Multi Media
		Perbankan dan Keuangan Mikro
		Tata Busana
40	SMK NEGERI KABUH	Analisis Pengujian Laboratorium
		Kimia Industri
		Farmasi Industri
41	SMK NEGERI KUDU	Teknik Pemesinan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Bisnis Konstruksi dan Properti
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

42	SMK NEGERI MOJOAGUNG	Kimia Industri
		Rekayasa Perangkat Lunak
		Bisnis Daring dan Pemasaran
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
43	SMK NEGERI WONOSALAM	Teknik Pemesinan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Agribisnis Tanaman Perkebunan
		Tata Boga
44	SMK NUSANTARA	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
45	SMK PALAPA NGORO	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
46	SMK PANCASILA MOJOWARNO	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Komputer dan Jaringan
		Bisnis Daring dan Pemasaran
47	SMK PATRIOT PETERONGAN	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Perhotelan
48	SMK PENDIDIKAN	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
49	SMK PERGURUAN MUALLIMAT CUKIR	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Perbankan Syariah
50	SMK PGRI 1 JOMBANG	Teknik Komputer dan Jaringan
		Multi Media
		Bisnis Daring dan Pemasaran
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
51	SMK PGRI 2 JOMBANG	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
		Teknik Pemesinan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

		Teknik Komputer dan Jaringan
52	SMK PGRI 3 JOMBANG	Akuntansi dan Keuangan Lembaga
53	SMK PGRI MOJOAGUNG	Multi Media
		Bisnis Daring dan Pemasaran
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
54	SMK PGRI PLOSO	Teknik Komputer dan Jaringan
		Multi Media
		Bisnis Daring dan Pemasaran
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
55	SMK PLUS KHOIRIYAH HASYIM	Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Seni Rupa
		Multi Media
56	SMK PLUS UMAR ZAHID	Desain Komunikasi Visual
		Teknik Komputer dan Jaringan
57	SMK SATRIA BARENG	Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Teknik Pemesinan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
58	SMK SEHAT INSAN PERJUANGAN	Bisnis Daring dan Pemasaran
		Farmasi
59	SMK SULTAN AGUNG 1 TEBUIRENG	Farmasi Klinis dan Komunitas
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
60	SMK SULTAN AGUNG 2 DIWEK	Teknik Audio Video
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
61	SMK SUNAN AMPEL	Tata Boga
62	SMK TAMANSISWA	Teknik Komputer dan Jaringan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
63	SMK TARBIYATUNNASYIIN	Teknik Komputer dan Jaringan

	DIWEK	Perbankan Syariah
64	SMK TELKOM DARUL ULUM PETERONGAN	Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi
		Rekayasa Perangkat Lunak
		Teknik Komputer dan Jaringan
		Multi Media
65	SMK TI ANNAJIYAH BU JOMBANG	Rekayasa Perangkat Lunak
		Multi Media
66	SMK TRISAKTI KUDU	Teknik Pemesinan
67	SMK UNGGULAN NU MOJOAGUNG	Teknik Pemesinan
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Komputer dan Jaringan
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
68	SMK WIDJAYA	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
69	SMK YPM 14 SUMOBITO	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik Komputer dan Jaringan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang (Data diolah)

Dari masing-masing sekolah tersebut memiliki unit kerja BKK untuk memberikan kemudahan bagi para lulusan ataupun siswa SMK untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidang yang mereka kuasai.

I.5.2 Kemitraan Disnakertrans dengan BKK dalam Pelaksanaan Program Antar Kerja

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang dibentuk antara dua pemangku kepentingan atau lebih. Dalam pembentukan suatu kemitraan, beberapa kelompok kepentingan memiliki tujuan masing-masing dalam pelaksanaannya, yaitu untuk meningkatkan, mempermudah, serta mencari keuntungan dari kedua belah pihak pelaku kerja sama baik antar kelompok, perusahaan, ataupun lainnya (Pradana & Hilman, 2020). Dikutip dari (Nurhalimah, 2020), Sulistiyani mengatakan bahwa kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama yang di dalamnya terdapat kesepakatan dan keperluan antara satu aktor dengan aktor

lainnya yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan salah satu bentuk kerja sama yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara beberapa pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Dalam keterkaitannya dengan kemitraan, layanan Antar Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memiliki mitra khusus dalam pengembangan serta perluasan kerja bagi siswa/siswi dan lulusan dari SMK. Bursa Kerja Khusus (BKK), merupakan lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang memiliki tujuan untuk melakukan bimbingan serta mempermudah pencarian kerja bagi siswa/siswi ataupun lulusan SMK untuk bekerja sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Hubungan kemitraan dari dua pemangku kepentingan tersebut tidak lain adalah untuk mengurangi persentase pengangguran dari lulusan SMK yang memiliki persentase tertinggi di Indonesia. Selain itu, hubungan kemitraan ini juga bertujuan untuk mengurangi terjadinya ketidaksesuaian antara bidang yang dikuasai dengan pekerjaan yang didapatkan oleh pencari kerja. Keuntungan lain dari kemitraan ini adalah semakin memudahkan pelayanan Antar Kerja dengan sumber daya pelaksana yang lebih bertambah dari BKK. Selain itu, mudahnya mencari kerja bagi siswa atau lulusan SMK akan meningkatkan citra sekolah di masyarakat dalam hal prospek pencarian kerja.

Dalam mekanisme pelaksanaan hubungan kemitraan antara program Antar Kerja dengan BKK di SMK, dilakukan melalui sistem *online* yang diintegrasikan untuk memudahkan proses verifikasi data pada siswa/siswi ataupun lulusan SMK yang sedang mencari pekerjaan. Selain itu, informasi terkait pasar kerja akan diberikan kepada BKK dan diteruskan oleh BKK di masing-masing SMK kepada para siswa/siswi dan lulusan SMK yang terdaftar sebagai pencari kerja. Kemudian diverifikasi berdasarkan data pencari kerja yang memenuhi kriteria lowongan pekerjaan yang ada di pasar kerja tersebut dan dilakukan pemanggilan tenaga

kerja, lalu pengiriman tenaga kerja kepada pemberi kerja yang bersangkutan. Selain itu, Disnakertrans juga sering memberikan penyuluhan terkait program Antar Kerja ini kepada siswa/siswi SMK agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin BKK yang ada di SMK untuk mempermudah pencarian kerja.

I.5.3 Evaluasi Program

I.5.3.1 Definisi Evaluasi Program

Dalam kebijakan publik yang telah ditetapkan, tentu perlu melalui beberapa tahap untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang telah ditetapkan, diperlukan suatu evaluasi kebijakan sehingga pembuat kebijakan dapat mengetahui gap yang terjadi antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil capaian dari kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evaluasi sendiri merupakan kata yang berarti penilaian. Dalam melakukan evaluasi tentu berkaitan dengan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti yang digunakan untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses lainnya menggunakan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dapat diartikan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian berkenaan dengan efektivitas beserta dampak dari diterapkannya suatu kebijakan pada masyarakat umum.

Menurut Arikunto dalam (Sumarno & Rahayu, 2018), evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang kemudian digunakan dalam penentuan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Sejalan dengan pendapat Arikunto, Kath Aspinwall dalam (Sumarno & Rahayu, 2018), menjelaskan secara kompleks bahwa evaluasi merupakan suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut manfaat bagi sasaran kelompok terkait program yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi kemudian dianalisis secara sistematis terkait dengan tujuan, kriteria, serta nilai yang telah ditetapkan. Sejalan dengan dua pendapat tersebut, (Ardiani & Ridwan, 2020) menjelaskan bahwa

“Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan, menyusun kebijakan maupun sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan membuat program selanjutnya”.

Sedangkan dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah tentu membentuk suatu program khusus yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Program sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu ataupun tanpa jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program juga dapat diakhiri sewaktu-waktu ketika dirasa tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau bahkan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Menurut (Sumarno & Rahayu, 2018), program merupakan suatu kegiatan sistematis dan berkesinambungan dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terstruktur. Sehingga program ditetapkan untuk dijalankan secara berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dari berbagai pendapat terkait definisi evaluasi dan program, penulis berpendapat bahwa evaluasi program merupakan suatu bentuk pengumpulan informasi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada suatu kegiatan yang telah dilaksanakan serta pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Arikunto dalam (Ardiani & Ridwan, 2020), mengatakan bahwa evaluasi program merupakan satu kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan dari suatu kebijakan yang berlangsung secara berkesinambungan dan terjadi pada suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang untuk mengambil keputusan. Sedangkan Posavac dalam (Sumarno & Rahayu, 2018), mengatakan bahwa evaluasi program merupakan sekumpulan metode, keterampilan, dan kepekaan yang diperlukan untuk mengetahui apakah masyarakat membutuhkan sebuah program pelayanan dengan memperhatikan kondisi lingkungannya apakah dapat

diterapkan pada lingkungan tersebut atau tidak, serta apakah program yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu bentuk pengumpulan informasi yang digunakan dalam penilaian suatu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan alternatif pengambilan keputusan selanjutnya, apakah program yang telah dilaksanakan harus dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

I.5.3.2 Tujuan Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan suatu bentuk pengumpulan informasi yang berfungsi untuk menilai berjalannya program yang telah diterapkan sebagai implementasi dari suatu kebijakan. Tujuan utama dari evaluasi program adalah mengetahui bagaimana tujuan serta pelaksanaan program telah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran atau belum. Selain itu, evaluasi program juga digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Subarsono dalam (Jumaah & Husein, 2018) memaparkan beberapa tujuan evaluasi, antara lain : 1) Menentukan tingkat kinerja suatu program, apakah program yang telah dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak; 2) Mengukur tingkat efisiensi program, seberapa besar manfaat yang ditimbulkan oleh program yang dilaksanakan dengan biaya dan upaya yang telah dikeluarkan; 3) Mengukur tingkat keluaran suatu program (*outcome*) terkait seberapa besar dan berkualitasnya hasil dari dilaksanakannya suatu program; (4) Mengukur dampak suatu program yang terlaksana, baik dampak positif maupun dampak negatif; (5) Mengetahui terjadinya penyimpangan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; (6) Sebagai bahan (*masukan*) untuk program selanjutnya yang akan diterapkan.

Sedangkan menurut William N. Dunn, evaluasi program memiliki 3 tujuan utama, yaitu : (1) Sebagai penyedia informasi yang valid dan kredibel terkait pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan, nilai, serta peluang yang dapat diwujudkan melalui tindakan masyarakat; (2) Menghasilkan klarifikasi dan kritik

terhadap nilai-nilai yang mendasari penetapan tujuan dan sasaran program. Klarifikasi nilai dilakukan berdasarkan penjelasan dengan pengoperasian program, sedangkan kritik terhadap nilai dilakukan berdasarkan kesesuaian antara tujuan dan sasaran terhadap masalah yang sedang terjadi; (3) Menghasilkan penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk penataan masalah dan peraturan (Dunn, 2018). Dengan informasi yang didapatkan melalui evaluasi program, dapat digunakan sebagai restrukturisasi program atau kebijakan dengan mempertimbangkan masalah yang sedang terjadi. Selain itu, evaluasi program dapat digunakan untuk membuat kebijakan baru serta pengambilan keputusan apakah program akan dilanjutkan dengan beberapa pergantian aturan atau dihentikan.

(Dunn, 2018) juga menjelaskan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi program, antara lain : *effectiveness*, *efficiency*, *adequacy*, *equity*, *responsiveness*, dan *appropriateness*. ***Effectiveness*** atau yang disebut efektivitas, merupakan kriteria evaluasi program yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya program yang diterapkan memiliki hasil sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat melalui suatu program apakah sudah sesuai dengan tujuan diterapkannya program atau belum. ***Efficiency*** atau yang disebut efisiensi, merupakan kriteria evaluasi program yang memiliki tujuan untuk mengetahui berapa besar upaya yang dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui efisiensi suatu program dapat dilakukan dengan melakukan analisis *cost and benefit* yang membandingkan antara biaya atau usaha yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program dengan manfaat yang didapatkan kelompok sasaran dalam program tersebut. Program yang diterapkan dapat dikatakan efisien ketika memiliki pengeluaran (usaha dan biaya) yang minim dengan hasil manfaat yang maksimal,

Adequacy atau yang disebut kecukupan, merupakan salah satu kriteria evaluasi program yang dikemukakan oleh William N, Dunn yang memiliki tujuan

untuk mengetahui seberapa besar hasil dari pelaksanaan suatu program dapat tercapai dengan sumber daya yang digunakan. Pada tahapan penetapan tujuan dan pelaksanaan program, tentu memiliki nilai-nilai tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Seketika tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai karena kecukupan sumber daya yang digunakan masih kurang, atau sebaliknya tujuan dapat tercapai dengan sumber daya yang digunakan terlalu banyak. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dengan kriteria kecukupan terhadap target dan sumber daya yang ada pada suatu program agar dapat mengatasi permasalahan di masyarakat. **Equity** atau yang disebut keadilan merupakan kriteria evaluasi yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah biaya dan manfaat dari program yang diterapkan dapat dirasakan oleh keseluruhan kelompok sasaran atau tidak. Program layanan yang diberikan pemerintah tentu menyasar kepada masyarakat umum dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, seluruh kelompok sasaran yang dapat memenuhi ketentuan tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program yang diterapkan tanpa adanya perbedaan.

Responsiveness atau yang disebut daya tanggap, merupakan suatu kriteria evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana respons dari penerima program (kelompok sasaran) terhadap pelaksanaan program. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap antusiasme dari kelompok sasaran dalam pelaksanaan program serta menghimpun kritik dan saran terkait kebutuhan dari kelompok sasaran yang kemudian digunakan untuk memperbaiki program. **Appropriateness** atau yang disebut kelayakan merupakan suatu kriteria evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan program yang telah dicapai benar-benar memberikan manfaat terhadap kelompok sasaran atau tidak. Sehingga diperlukan suatu evaluasi terkait tujuan yang ingin dicapai agar bisa memberikan manfaat yang berguna bagi kelompok sasaran.

I.5.3.3 Model Evaluasi Program Menurut William N. Dunn

Evaluasi yang merupakan suatu kegiatan untuk menilai berjalannya suatu program memiliki kaitan erat dengan keberhasilan dari suatu program. Suatu program dapat dinilai berhasil apabila telah memenuhi aspek-aspek yang ada dalam kriteria evaluasi seperti yang telah dipaparkan oleh William N. Dunn yang termasuk di dalamnya adalah ketepatan tujuan program, manfaat yang dihasilkan, serta usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan program. Menurut (Dunn, 2018), Evaluasi memiliki 2 aspek yang saling berkaitan, yaitu berbagai macam metode yang digunakan dalam melakukan pemantauan untuk evaluasi program, serta penentuan nilai yang akan dihasilkan dari suatu program berdasarkan manfaatnya kepada kelompok sasaran. William N. Dunn juga memaparkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi program, yaitu : *pseudo-evaluation*, *formal evaluation*, dan *decision-theoretic evaluation*.

Pseudo-evaluation merupakan suatu pendekatan evaluasi program yang prosesnya menggunakan evaluasi secara deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan kredibel terkait dengan hasil yang telah dicapai dalam suatu pelaksanaan program. Dalam model ini, informasi yang didapatkan hanya seputar hasil dari suatu program yang dijalankan tanpa menanyakan manfaat yang didapatkan dari program tersebut kepada masyarakat. Karena, menurut model ini manfaat yang didapatkan oleh setiap individu atau kelompok tentu berbeda dan hal tersebut merupakan suatu yang dapat muncul dengan sendirinya. Dalam model evaluasi ini, analisis yang digunakan memiliki berbagai macam metode, seperti : kuesioner, wawancara, *random sampling*, dsb. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai macam jenis informasi secara valid dari berbagai kelompok sasaran yang melaksanakan program tersebut.

Formal evaluation merupakan pendekatan evaluasi program yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan kredibel terkait hasil yang didapat oleh suatu program yang didasari dengan pemberitahuan tujuan dari suatu program secara formal kepada pihak evaluator oleh pembuat dan pelaksana program. Sehingga evaluasi yang dilakukan dalam

model ini merujuk pada tujuan awal program yang telah dipaparkan secara formal oleh pembuat program dengan menilai hasil yang didapat selama pelaksanaan program, apakah sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam model ini, tujuan program yang dipaparkan secara formal melalui Peraturan Pemerintah, Undang-Undang atau peraturan lainnya oleh pembuat kebijakan berfungsi sebagai patokan utama dalam melakukan evaluasi program yang mengukur manfaat serta nilai yang dihasilkan dari suatu program. *Formal evaluation* memiliki berbagai tipe, yang dapat dilihat dalam gambar 1.2.

Types of Formal Evaluation		
Control over Policy Actions	Orientation toward Policy Process	
	Formative	Summative
Direct	Developmental evaluation	Experimental evaluation
Indirect	Retrospective process evaluation	Retrospective outcome evaluation

Gambar 1.2 : Tipe formal evaluation

Sumber : Buku Public Policy Analysis : An Integrated Approach karangan William N. Dunn

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa model *formal evaluation* memiliki beberapa tipe, yang diukur dari segi orientasi terhadap proses kebijakan memiliki 2 sifat, yaitu formatif dan sumatif. Selain itu, terdapat tipe yang dikelompokkan berdasar kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan, yaitu secara langsung dan tidak langsung, yang di antaranya adalah : *developmental evaluation*, *retrospective process evaluation*, *experimental evaluation*, dan *retrospective outcome evaluation*.

Developmental evaluation merupakan tipe evaluasi formatif yang mengacu pada kegiatan evaluasi secara berkala dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari staf pelaksana program. *Developmental evaluation* ini berguna untuk memberikan peringatan kepada staf pelaksana program terkait kelemahan-kelemahan yang baru muncul ataupun kegagalan program yang sama sekali tidak pernah terbayangkan sebelumnya, serta memastikan operasi yang tepat dalam pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab staf pelaksana. Sehingga dalam melaksanakan evaluasi tersebut membutuhkan kontrol secara

langsung pada staf pelaksana program dengan tujuan melakukan revisi pada pelaksanaan program yang dievaluasi secara berkala. *Retrospective process evaluation* merupakan tipe evaluasi formatif yang dilakukan pada pelaksanaan program dalam jangka waktu tertentu, meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi pada suatu program. *Retrospective process evaluation* merupakan kegiatan evaluasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program yang tidak memperkenankan untuk melaksanakan manipulasi terhadap masukan yang ada ataupun sistem pelaksanaan program. Sehingga informasi yang didapatkan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan suatu program merupakan informasi yang dapat digunakan untuk merevisi sistem program ataupun merumuskan program lainnya.

Experimental evaluational merupakan tipe evaluasi sumatif yang memiliki kontrol secara langsung dalam masukan maupun pelaksanaan program. Evaluasi tipe ini memiliki beberapa variabel yang dikontrol oleh pelaksana dalam implementasi program, yaitu masukan serta proses kebijakan. Terkait apa saja yang harus dipertahankan, ditambah, dikurangi atau bahkan dihilangkan dalam pelaksanaan program kebijakan. *Experimental evaluational* memiliki beberapa persyaratan agar dapat digunakan untuk menganalisis suatu program yang diterapkan, antara lain (1) Variabel perlakuan dalam pelaksanaan program kebijakan yang didefinisikan secara jelas dan dapat dimanipulasi secara langsung; (2) Strategi evaluasi yang memungkinkan untuk menggeneralisasikan secara maksimal terkait kinerja suatu program kepada kelompok sasaran serta peraturan yang serupa; (3) Strategi evaluasi yang memungkinkan untuk mengurangi kesalahan dalam penafsiran bahwa program kebijakan sebagai hasil dari manipulasi masukan dari suatu program kebijakan; (4) Sistem pemantauan yang dapat menghasilkan data yang kredibel berkenaan dengan hubungan antar kondisi, kejadian tidak terlihat, masukan, proses, hasil, serta dampak yang timbul akibat dari program kebijakan.

Retrospective outcome evaluation merupakan suatu bentuk evaluasi sumatif yang berfokus kepada hasil pelaksanaan program kebijakan yang tidak

disertai kontrol secara langsung terhadap manipulasi *input* ataupun proses pelaksanaan kebijakan. *Retrospective outcome evaluation* meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan kontrol secara langsung kepada manipulasi program kebijakan. Tipe ini, memiliki 2 bentuk, yaitu : *longitudinal studies*, yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan jangka waktu yang cukup lama dan berkala, karena dalam proses pemantauan dan evaluasi yang terjadi melibatkan informasi yang cukup kompleks dengan melihat beberapa hasil program kebijakan yang saling berkesinambungan. Sedangkan *Cross-Sectional* berbeda, pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan cukup pendek. *Cross-Sectional* hanya berfokus pada satu aspek hasil program kebijakan, apakah hasil ataupun manfaat yang diterima kelompok sasaran dari ditetapkan suatu program pada daerah satu dengan lainnya memiliki perbedaan serta penyebab terjadinya perbedaan tersebut.

Decision-Theoretic evaluation merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan suatu informasi yang valid dan kredibel terkait hasil program kebijakan yang telah diterapkan, secara eksplisit dinilai oleh banyak pemangku kepentingan. *Decision-Theoretic evaluation* mencoba untuk memunculkan tujuan-tujuan eksplisit dari para pemangku kepentingan terkait program yang telah ditetapkan, karena tujuan program yang secara formal telah dipaparkan merupakan bentuk dari persetujuan beberapa kelompok kepentingan, juga beberapa level pelaksana kebijakan. Sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian kinerja pelaksana program serta evaluasi program dari berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan model penelitian *formal evaluation* dengan tipe *retrospective process evaluation*, yang merupakan tipe evaluasi formatif yang dilakukan pada pelaksanaan program dalam jangka waktu tertentu meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi pada suatu program. Tipe ini juga dipilih karena dalam pelaksanaan evaluasi program tidak memperkenankan untuk melakukan manipulasi terhadap *input* ataupun sistem pelaksanaan program.

Sehingga informasi yang didapatkan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan Program Antar Kerja dapat digunakan untuk merevisi sistem program ataupun merumuskan program lainnya.

I.6 Definisi Konsep

1. Kebijakan Publik : Suatu bentuk tindakan ataupun keputusan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan cara, sarana, dan target untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat umum.
2. Kemitraan : Suatu bentuk kerja sama yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara beberapa pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
3. Evaluasi Program : Suatu bentuk pengumpulan informasi yang digunakan dalam penilaian kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan alternatif pengambilan keputusan selanjutnya.
4. *Effectiveness* : Ketercapaian tujuan program berdasarkan target dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. *Efficiency* : Besar kecilnya usaha yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
6. *Adequacy* : Kecukupan terhadap target dan sumber daya yang ada pada pelaksanaan program.
7. *Equity* : Keadilan berupa kesamarataan hak yang didapatkan oleh kelompok sasaran dalam pelayanan program yang diberikan.
8. *Responsiveness* : Respons atau tanggapan dari penerima program dalam proses pelaksanaan program.
9. *Appropriateness* : Kelayakan program dalam memberikan manfaat pada kelompok sasaran.

I.7 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang menjabarkan suatu permasalahan dengan menggunakan data-data yang tidak dapat

diukur. Data yang tidak dapat diukur tersebut seperti halnya pemikiran dari manusia yang berbeda-beda, sehingga peneliti harus bisa menempatkan posisinya dalam menerjemahkan pemikiran yang berbeda-beda tersebut. Selain pola pikir manusia yang berbeda, kondisi hati serta mental dari manusia dapat memengaruhi data penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interpretatif yang merupakan pendekatan dengan merujuk pada data-data yang berada di lapangan untuk dianalisis kemudian. Pendekatan interpretatif mencakup fakta yang terjadi di lapangan dan bagaimana responden memandang suatu fenomena untuk kemudian dijadikan data yang akan dianalisis oleh peneliti. Menurut (Leavy, 2017), pendekatan interpretatif merupakan kajian terhadap bagaimana orang terlibat dalam suatu konstruksi sosial melalui interaksi sehari-hari. Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah menentukan tipe penelitian yang digunakan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang ditemukan di lapangan. Yang kedua adalah menentukan lokasi dari penelitian tersebut. Dalam hal ini, sesuai dengan lokus penelitian, yakni Kabupaten Jombang yang memiliki tingkat pengangguran nomor 7 terbesar di Jawa Timur pada tahun 2021 dan persentase penempatan kerja terendah di antara kabupaten/ kota yang tergabung dalam 7 besar pemilik angka pengangguran terbesar di Jawa Timur pada tahun 2021. Lokasi penelitian akan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang selaku pihak yang berwenang dalam pelaksanaan Program Antar Kerja. Selain itu, lokasi lainnya akan bertempat pada beberapa BKK dari beberapa SMK yang aktif dalam melakukan penyaluran tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, penentuan informan penelitian yang menggunakan teknik *purposive* atau penunjukan informan secara langsung dan *snowball* atau disebut teknik bola salju, yang merupakan penunjukan informan melalui rekomendasi yang diberikan oleh informan sebelumnya. Yang keempat adalah pengumpulan data yang dimulai dengan mengajukan izin penelitian pada dinas terkait yang kemudian dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan data digital. Yang kelima adalah menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber

data dan metode, dengan mencocokkan hasil dari sumber data (informan, dokumen, data audio visual) dan metode pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi) sehingga ditemukan data yang valid. Yang keenam adalah melakukan analisis data dengan melakukan pemrosesan data yang telah didapatkan dengan melakukan pengelompokan dan pemberian label pada data yang telah didapatkan. Kemudian data tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan pelabelan yang telah diberikan dalam bentuk tabel. Kemudian dari data yang telah disajikan tersebut diinterpretasi oleh penulis untuk memberikan pandangan penulis terhadap data yang telah didapatkan. Kemudian yang terakhir adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah disajikan sebagai hasil akhir dari proses penelitian.

I.7.1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif memiliki beberapa tipe penelitian, seperti yang dijelaskan oleh (Samsu, 2017), bahwa terdapat 8 macam tipe penelitian dalam metode penelitian kualitatif, antara lain : (1) Penelitian kasus (*case study*) , (2) Penelitian deskriptif, (3) Penelitian tindakan kelas (*classroom action research*), (4) Penelitian fenomenologi, (5) Penelitian etnografi, (6) Penelitian *grounded theory*, (7) Penelitian sejarah (*history*), dan (8) Penelitian hermeneutika. Sedangkan (Creswell & Creswell, 2018) menyatakan bahwa tipe penelitian kualitatif ada 5 jenis, yaitu : (1) Penelitian naratif, (2) Penelitian fenomenologi, (3) Penelitian etnografi, (4) Penelitian studi kasus, dan (5) Penelitian *grounded theory*

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan suatu fenomena sosial (Samsu, 2017). Tipe penelitian deskriptif ini dipilih karena sifatnya yang menggambarkan keadaan objek penelitian secara faktual dengan keadaan di lapangan. Selain itu, menyesuaikan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi Program Antar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bermitra dengan Bursa Kerja Khusus untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMK di Kabupaten Jombang.

Sehingga dalam penelitian ini diperlukan penggambaran kondisi program saat ini beserta penjabaran evaluasi program dari perspektif pelaksana program untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan program yang telah dilaksanakan.

I.7.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Antar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bermitra dengan Bursa Kerja Khusus untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMK di Kabupaten Jombang” ini, akan dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penyelenggara Program Antar Kerja, serta beberapa BKK pada 10 SMK (5 SMK negeri dan 5 SMK swasta) yang pernah melaksanakan Program Antar Kerja, antara lain : SMKN 1 Jombang, SMKN 2 Jombang, SMKN 3 Jombang, SMKN Gudo, SMKN Mojoagung, SMK Dwija Bhakti 1 Jombang, SMK Widjaya Ngoro, SMK Diponegoro Ploso, SMK Taman Siswa Mojoagung, dan SMK PGRI 1 Jombang. Beberapa SMK tersebut dipilih karena partisipasinya yang aktif dalam melaksanakan Program Antar Kerja yang direkomendasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.

SMKN 1 Jombang menjadi salah satu rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang karena peran aktifnya dalam pelaksanaan Program Antar Kerja dan memiliki banyak kerja sama dengan berbagai perusahaan sehingga sering terjadi penyaluran tenaga kerja bagi siswa-siswi mereka. Kemudian, ada SMKN 2 Jombang yang cenderung jarang dalam menyalurkan tenaga kerja sehingga perlu diteliti penghambat dari pelaksanaan Program Antar Kerja di SMK tersebut. Kemudian, ada SMKN 3 Jombang menjadi salah satu SMK paling aktif dalam pelaksanaan Program Antar Kerja dan sudah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan sehingga sering melakukan penyaluran tenaga kerja. Kemudian, SMKN Mojoagung yang sering melakukan antar kerja ke luar negeri dan sering menjadi tempat perekrutan tenaga kerja dari berbagai macam perusahaan. Kemudian, SMKN Gudo yang partisipasinya dalam pelaksanaan Program Antar Kerja masih baru memulai kembali, karena BKK yang lama tidak aktif.

Dari SMK swasta, ada SMK PGRI 1 Jombang yang menjadi salah satu SMK paling aktif dalam pelaksanaan Program Antar Kerja. Selain itu, SMK PGRI 1 Jombang juga merupakan SMK yang paling sering diberikan fasilitas oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang. Kemudian ada SMK Taman Siswa Mojoagung yang merupakan SMK yang juga memiliki peran aktif dalam pelaksanaan Program Antar Kerja. Kemudian, ada SMK Diponegoro Ploso yang masih beberapa tahun memulai kembali pelaksanaan Program Antar Kerja setelah lama tidak terurus karena BKK yang tidak aktif. Kemudian ada SMK Widjaya Ngoro yang lebih sering melakukan penyaluran tenaga kerja bergabung dengan SMK lain yang mengadakan perekrutan. Selain itu, SMK Widjaya Ngoro juga memiliki banyak kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk melakukan penyaluran tenaga kerja. Kemudian ada SMK Dwija Bhakti 1 Jombang yang merupakan salah satu SMK swasta paling aktif dalam menyalurkan tenaga kerja.

I.7.3. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam penelitian yang merupakan sumber dari data-data primer yang nantinya akan dianalisis untuk yang mendapatkan kesimpulan akhir dalam penelitian. Menurut (Samsu, 2017), informan merupakan subjek dari penelitian, yaitu orang yang dapat merespons dan memberikan informasi tentang data penelitian. Peran informan sangat sentral dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan penjabaran suatu fenomena sosial. Sehingga, tanpa adanya informan, penelitian tidak dapat dilakukan dengan maksimal jika hanya mengandalkan data-data sekunder seperti : dokumen, video, ataupun sebagainya.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive*. Menurut (Samsu, 2017), *purposive* merupakan teknik penentuan informan yang berdasar pada *One Man Target* atau langsung menentukan informan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti dapat menentukan informan yang akan digunakan dalam penelitian atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sedangkan *snowball*, merupakan teknik penentuan informan yang berdasar pada informan kunci. Informan ini dapat dipilih

berdasarkan rujukan yang diberikan oleh informan kunci, sehingga kemungkinan data yang diterima akan menjadi lebih kompleks dengan jumlah informan yang juga bertambah banyak. Menurut (Tracy, 2013), Solusi untuk menekan agar jumlah informan tidak bertambah terlalu banyak adalah dengan mengambil beberapa informan yang dapat mewakili suatu kelompok yang ingin diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, informan yang dipilih secara *purposive* sebagai informan kunci adalah : Ibu Dwi Dis Setiyawati, SE., selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang. Informan tersebut dipilih karena bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan program Antar Kerja. Selain itu, beliau memiliki pengetahuan yang kompleks mengenai berjalannya Program Antar Kerja di lapangan. Adapun informan lainnya dipilih secara *snowball* berdasarkan rujukan dari Ibu Dwi Dis Setiyawati, SE antara lain :

1. Bapak Hafis Muaddab, M.Pd., selaku Ketua BKK SMKN 1 Jombang. Informan tersebut direkomendasikan karena BKK SMKN 1 Jombang sendiri sangat aktif dalam melakukan kegiatan dalam Program Antar Kerja. Selain itu, beliau merupakan penghubung dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dan pihak industri dengan BKK SMKN 1 Jombang;
2. Bapak Drs. Muslich Hasyim, M. M.Pd., selaku Ketua BKK SMKN 2 Jombang. Informan tersebut direkomendasikan karena memiliki jabatan sebagai Ketua BKK SMKN 2 Jombang sekaligus Ketua Forum BKK Kabupaten Jombang;
3. Ibu Lulut Istuning Banowati, S.Psi., selaku Sekretaris BKK SMKN 3 Jombang. Informan tersebut direkomendasikan karena memiliki pengalaman dalam mengurus BKK untuk melaksanakan Program Antar Kerja sejak tahun 2005 sehingga sudah mengetahui kondisi di lapangan dalam pelaksanaan Program Antar Kerja secara merinci;

4. Ibu Mareta Formula F., S.Pd., selaku Ketua BKK SMKN Gudo. Informan tersebut direkomendasikan karena beliau merupakan penghubung dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dan pihak industri dengan BKK SMKN Gudo untuk melaksanakan Program Antar Kerja;
5. Ibu Dra, C. Nanik Windrawati., MM., selaku Ketua BKK SMKN Mojoagung. Informan tersebut direkomendasikan karena sudah lama mengurus BKK SMKN Mojoagung dengan jabatan yang berganti-ganti dari Waka Humas dan Ketua BKK. Sehingga beliau direkomendasikan karena telah memiliki banyak pengalaman dalam pelaksanaan Program Antar Kerja;
6. Bapak Djoko Sutrisno, S.T., selaku Ketua BKK SMK Dwija Bhakti 1 Jombang. Informan tersebut direkomendasikan karena BKK SMK Dwija Bhakti tergolong sangat aktif dalam melaksanakan Program Antar Kerja untuk menyalurkan siswanya ke berbagai dunia industri;
7. Bapak Wahjudi Hari Prihantono, S.Pd., selaku Ketua BKK SMK Widjaya Ngoro. Informan tersebut direkomendasikan karena sebagai satu-satunya anggota yang aktif dalam BKK SMK Widjaya Ngoro. Selain itu, beliau memiliki relasi yang kuat dengan berbagai perusahaan maupun BKK dari SMK lainnya untuk memudahkan penyaluran lulusan SMK Widjaya Ngoro;
8. Ibu Tresia Anita Sari S.Pd., selaku Sekretaris BKK SMK Diponegoro Ploso. Informan tersebut direkomendasikan karena merupakan pengurus BKK yang baru aktif setelah lama tidak aktif. Sehingga beliau memiliki berbagai pengetahuan bagaimana tantangan dan kendala dalam memulai pelaksanaan Program Antar Kerja dengan menjaring berbagai perusahaan industri untuk diajak kerja sama;
9. Ibu Yenny Tri W., S.Pd., selaku Ketua BKK SMK Taman Siswa Mojoagung. Informan tersebut direkomendasikan karena memiliki berbagai pengalaman dalam melaksanakan Program Antar Kerja.

Selain itu, beliau sebagai Ketua BKK SMK Taman Siswa memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam penyaluran tenaga kerja;

10. Ibu Deby Okta Harisanty S.Pd., selaku Ketua BKK SMK PGRI 1 Jombang. Informan tersebut direkomendasikan karena telah memiliki rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan Program Antar Kerja. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Forum BKK Kabupaten Jombang sekaligus Humas Forum BKK Provinsi Jawa Timur. Adapun pengalaman dalam melakukan MoU dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan penyaluran siswa/siswi SMK PGRI 1 Jombang dalam Program Antar Kerja.

I.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan suatu metode dalam mengumpulkan data, agar penelitian yang dilakukan dapat sesuai dengan metode penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Antar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bermitra dengan Bursa Kerja Khusus untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMK di Kabupaten Jombang” ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Data audio visual sesuai yang diungkapkan oleh (Creswell & Creswell, 2018).

Menurut (Leavy, 2017), Terdapat dua jenis observasi, yaitu observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan mengikuti kegiatan dari subjek penelitian, sehingga peneliti juga dapat merasakan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan observasi non-partisipatif merupakan observasi yang dilakukan oleh peneliti tanpa mengikuti kegiatan dari subjek penelitian, peneliti hanya mengamati menggunakan seluruh indra yang dimiliki terhadap fenomena yang sedang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, yang dilakukan untuk mengamati pelayanan Antar Kerja yang diberikan oleh Disnakertrans dan BKK pada siswa/lulusan SMK di Kabupaten Jombang.

Dalam metode wawancara, (Leavy, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat 3 level dalam wawancara, yaitu : Wawancara tidak terstruktur, Wawancara semi-terstruktur, dan Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang bersifat terbuka dengan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti bersifat terstruktur sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Sedangkan wawancara semi-terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman dengan beberapa penjabaran dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk memperoleh data yang lebih luas. Kemudian, wawancara tidak terstruktur yang merupakan teknik wawancara yang bersifat terbuka dan tidak memiliki suatu pedoman khusus yang bertujuan untuk mendapatkan data penelitian yang lebih luas berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta pandangan dari subjek penelitian terhadap fenomena yang dialami. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang akan digunakan adalah teknik wawancara secara mendalam yang berada pada level semi-terstruktur terstruktur sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih kompleks beserta pandangan dan pendapat dari informan terkait pelayanan Antar Kerja yang diberikan oleh Disnakertrans dan BKK pada siswa/lulusan SMK di Kabupaten Jombang.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menemukan dokumen-dokumen maupun data digital yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan, anggaran kegiatan, hingga peraturan dari kegiatan sebagai objek penelitian. Selain itu, dokumen berupa hasil pemikiran dari peneliti sebelumnya juga dapat digunakan sebagai data penelitian tentang pelayanan Antar Kerja yang diberikan oleh Disnakertrans dan BKK pada siswa/lulusan SMK di Kabupaten Jombang. Kemudian data digital audio visual merupakan data yang didapatkan dari media elektronik seperti internet, halaman web, ataupun media sosial berupa gambar, foto, audio, maupun video yang bisa digunakan untuk menunjang penelitian terkait pelayanan Antar Kerja yang diberikan oleh Disnakertrans dan BKK pada siswa/lulusan SMK di Kabupaten Jombang.

Untuk data yang diperlukan dalam penelitian, antara lain adalah :

- 1) Aturan, Pelaksana, serta Mekanisme layanan dalam Program Antar Kerja;
- 2) Mekanisme kemitraan Disnakertrans dan BKK dalam Pelayanan program Antar Kerja;
- 3) Target Program Antar Kerja oleh Disnakertrans dan BKK setiap tahunnya;
- 4) Dampak yang ditimbulkan dari program Antar Kerja yang dilaksanakan oleh BKK SMK di Kabupaten Jombang;
- 5) Kelebihan dan kekurangan program Antar Kerja di SMK pada Kabupaten Jombang menurut Disnakertrans dan BKK;
- 6) Faktor yang memengaruhi pelaksanaan program Antar Kerja di SMK pada Kabupaten Jombang.

I.7.5. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik menguji validitas data dengan membandingkan data yang didapat dalam penelitian. Teknik triangulasi data merupakan teknik pengujian keabsahan data dengan membandingkan data yang ada (Samsu, 2017). Memiliki pendapat yang sama dengan Samsu, (Leavy, 2017) menyatakan bahwa Triangulasi merupakan strategi yang biasa digunakan ketika dalam suatu penelitian menggunakan beberapa metode pengumpulan data atau sumber data untuk menjawab satu pertanyaan yang sama. Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan validitas data pada penelitian dengan beberapa metode atau sumber data yang didapatkan. Memiliki pendapat yang lebih kompleks dari Samsu dan Leavy, (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) menyebutkan bahwa teknik triangulasi data merupakan teknik membandingkan data yang diperoleh berdasarkan pada Sumber data (informan, tempat, waktu yang berbeda), Metode (observasi, wawancara, dokumentasi), Peneliti (peneliti A,B,C), Teori, dan Tipe data (teks, audio, video). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi Sumber data dan Metode yang mencakup perbedaan informan, tempat, waktu, dan metode pengumpulan data.

I.7.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, sering kali data yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dokumentasi, maupun sumber audio dan visual tidak dapat diolah dengan baik. Untuk menghindari hal tersebut, setiap penelitian membutuhkan prosedur sebagai acuan dalam mengolah data yang telah didapatkan agar tidak semrawut. Sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data yang dicetuskan oleh (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) dengan tahapan-tahapan seperti :

1. Data Prosessing and Preparation

Merupakan tahap awal dalam pemrosesan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Pada tahapan ini, mencakup kegiatan transkrip data penelitian yang telah diperoleh, pemberian kode pada setiap data, pengelompokan data berdasar kode yang telah diberikan. Proses pemberian kode ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah didapatkan, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengolah dan menyajikan data.

2. Displaying Data

Merupakan tahapan untuk menampilkan data penelitian yang telah didapatkan. Setelah melalui tahap pemrosesan data yang telah diperoleh, peneliti harus melakukan penyajian data untuk ditampilkan kepada pembaca. Sehingga dalam tahap ini diperlukan metode yang dapat memudahkan proses penyajian data agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Miles, Huberman dan Saldana, menyatakan bahwa dalam tahap penyajian data dapat dilakukan dengan model matriks dan bagan yang dapat mempermudah penyajian data. Setelah data disajikan dalam bentuk matriks atau bagan, kemudian dilanjutkan dengan pendeskripsian data secara umum dan pendeskripsian makna yang dimaksud oleh informan dalam pemberian data.

3. Verifying Conclusions

Merupakan tahap perumusan kesimpulan dari data yang telah dianalisis sebelumnya. Data-data yang merupakan hasil temuan di lapangan sebelumnya

telah melalui tahap pemrosesan, penyajian, dan analisis dengan menunjukkan pola dan hubungan sebab akibatnya kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari temuan data tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan diawali dengan pemrosesan data berupa transkrip audio hasil wawancara beserta pemberian label pada hasil transkrip tersebut sesuai dengan kriteria evaluasi kebijakan. Pada data hasil observasi dan dokumentasi juga dilakukan hal yang sama dengan memberikan label khusus sesuai dengan kriteria evaluasi kebijakan. Setelah itu, data berupa transkrip dari wawancara dan hasil dokumentasi yang telah diberi label tadi disajikan sesuai dengan kriteria evaluasi kebijakan dan diberikan tabel pada akhir penyajian data untuk memudahkan membaca data.

Setelah data disajikan, kemudian dilakukan interpretasi data untuk memberikan pandangan penulis terhadap data yang telah disajikan. Kemudian dari hasil penyajian dan interpretasi data tersebut, ditarik kesimpulan sesuai dengan tiap-tiap kriteria evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil dari penelitian secara ringkas. Dan yang terakhir, pemberian saran dari penulis untuk objek penelitian sesuai dengan permasalahan yang terjadi untuk optimalisasi pelaksanaan program.